



PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN
2026



@inspektorat batam



www.inspektorat.batam.go.id



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 372 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;

b. landasan...

- b. landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Agustus 2026

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 372 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2026

--	--	--

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, Agustus 2026.
Inspektur Daerah Kota Batam,



Demi Hasfinul Nasution, S.H, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19671224 199403 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

**BAB II EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026 7**

2.1 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Inspektorat sampai dengan
Triwulan II Tahun 2026..... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah..... 12

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Inspektorat Daerah 12

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT
DAERAH 14**

BAB IV PENUTUP 38

4.1 Catatan Penting..... 41

4.2 Kaidah Pelaksanaan 41

4.3 Rencana Tindak Lanjut 41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II	6
Tabel 3.1	Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2026	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 2 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2026 maka Inspektorat Daerah Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2026, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Inspektorat Daerah Kota Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

- Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
 6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546);
 7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 55 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1625);
 8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2026 Nomor);
 9. Surat Edaran Walikota Batam Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
BAB III		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV		PENUTUP
	4.1	Catatan Penting
	4.2	Kaidah Pelaksanaan
	4.3	Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp.60.010.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.438.275 dengan persentase sebesar 9,06%.
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp.1.643.895.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 242.397.435 dengan persentase 14,75%
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dianggarkan sebesar Rp.3.607.566.600 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 85.750.000 dengan presentase sebesar 2,38%.
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dianggarkan Rp.326.850.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp.62.069.900 dengan presentase sebesar 18,99%
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dianggarkan sebesar Rp. 808.159.800 dan realisasi sebesar Rp.96.591.987 dengan persentase sebesar 11,95%.
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dianggarkan sebesar Rp.177.296.400 dan realisasi sebesar Rp.41.825.400 dengan persentase sebesar 23,59%.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan dianggarkan sebesar Rp.32.082.600 dan realisasi keuangan sebesar Rp.0 atau 0.00%.
 - b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dianggarkan sebesar Rp.2.829.713.400 dan realisasi keuangan sebesar Rp.253.676.182 atau 8,96%.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp.36.677.383.250 dan realisasi keuangan sebesar Rp.16.688.310.795 dengan persentase sebesar 45,5%.
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp.2.936.236.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 707.325.297 dengan persentase sebesar 24,09%.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dianggarkan sebesar Rp70.360.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp.20.824.290 dengan persentase sebesar 29,60%.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tidak ada kegiatan yang melebihi dari target.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Realisasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
601.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP PD	76,89	75,33	97,97
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	93,50	92,57	99,01
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	60%	60
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>50</i>
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>67</i>
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	50%	50
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>90 Orang/ Bulan</i>	<i>90 Orang/ Bulan</i>	<i>100</i>
	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>6 Laporan</i>	<i>50</i>

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Realisasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1				2	3	4	5	6
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	66,67 %	66,67
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 orang	60 orang	67
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	50%	50
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	0
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	33
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	50
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6 Laporan	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Realisasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2				3	4	5	6
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	0%	0
				<i>Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	<i>4 Paket</i>	<i>0 paket</i>	<i>0</i>
				<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>45 Unit</i>	<i>35 unit</i>	<i>78</i>
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	50%	50
				<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>12 laporan</i>	<i>6 laporan</i>	<i>50</i>
				<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>12 laporan</i>	<i>6 laporan</i>	<i>50</i>
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	50%	50
				<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>1 Unit</i>	<i>1 Unit</i>	<i>100</i>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Realisasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	6 Unit	75
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	93 Unit	0 Unit	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP	100%	29,41%	29,41
		Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP N-1	100%	100%	100
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%	38,68 %	38,68
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	15 Laporan	0 Laporan	0
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	0 Laporan	0
	Review Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	20 Laporan	0 Laporan	0
	Review Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100
	Kerja sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Realisasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1				2	3	4	5	6
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	1 Dokumen	50
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi pada pengawasan tujuan tertentu N-1	100%	100%	100%
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	1 Laporan	0 laporan	0
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	4 Laporan	1 laporan	25
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pemenuhan komponen dan area Indeks Manajemen Risiko	100%	0%	0
					Persentase pemenuhan pilar IEPK	100%	0%	0
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100%	0%	0
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0
				Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program <i>(outcomes)</i> / Kegiatan <i>(output)</i>	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Realisasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2				3	4	5	6
					asistensi			
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	100
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	100
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 kegiatan	0 kegiatan	0
				Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	17 Perangkat Daerah	17 Perangkat Daerah	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026 s/d Triwulan II

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
	Nilai Kapabilitas APIP	Level	3 (3,050)	Level	3 (2,370)	Adanya perubahan aturan terkait penilaian kapabilitas APIP
	Indeks Manajemen Risiko	Nilai	3,225	Nilai	2,498	
	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Nilai	3,154	Nilai	2.748	
	Indeks Kepuasan Masyarakat di Inspektorat	Nilai	91,77	Nilai	0	Belum ada realisasi karena pelaksanaannya di triwulan III

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas inspektorat mencakup berbagai aspek terkait pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa isu utama meliputi akuntabilitas pengelolaan keuangan, pergeseran paradigma pengawasan dari watchdog menjadi mitra konsultasi, serta dualisme pembinaan sistem pengawasan di internal inspektorat. Selain itu, tantangan dalam mencapai target kinerja, realisasi program yang tidak sesuai rencana, dan faktor penyebab kegagalan juga menjadi perhatian.

Berikut adalah beberapa isu penting yang sering dihadapi oleh Inspektorat:

1. Kualitas dan Kapasitas SDM Pengawas
 - a. Belum optimalnya kualitas SDM pengawas dalam menghadapi kompleksitas pengawasan proyek strategis dan pengelolaan keuangan daerah di Kota Batam.
 - b. Belum optimalnya jumlah auditor dan P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah).
 - c. Belum meratanya kompetensi teknis audit (keuangan, kinerja, investigatif).
 - d. Belum optimalnya kebutuhan sertifikasi profesi.
2. Independensi dan Objektivitas Pengawasan
 - a. Belum optimalnya independensi dan objektivitas pengawasan internal.
3. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

- a. Belum optimalnya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari Inspektorat maupun lembaga eksternal oleh perangkat daerah, sehingga berpotensi menghambat perbaikan tata kelola.
 - b. Kurangnya komitmen OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam menindaklanjuti temuan.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi
- a. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan, seperti e-audit dan integrasi data antar OPD untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
 - b. Sistem pengawasan berbasis digital belum maksimal.
 - c. Keterbatasan infrastruktur IT dan kemampuan SDM dalam analisis data.
 - d. Belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas hasil pengawasan kepada publik, seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan profesional di Kota Batam.
5. Manajemen Risiko dan SPIP
- a. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh OPD, khususnya dalam pengelolaan risiko.
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan berbasis risiko (*risk-based audit*), sehingga pengawasan masih cenderung berfokus pada kepatuhan administratif dibandingkan kinerja dan dampak.
6. Perubahan Regulasi
- a. Seringnya terjadi perubahan regulasi dari pemerintah pusat.
7. Kemitraan dan Peran
- a. Belum optimalnya koordinasi dengan aparat pengawasan eksternal dan penegak hukum, seperti BPKP dan KPK, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan.
 - b. Belum optimalnya peran konsultatif Inspektorat sebagai mitra strategis OPD dalam pencegahan kesalahan dan peningkatan kualitas tata kelola.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam pada tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026.

Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan yang mengalami penambahan terdiri dari 7 Sub Kegiatan, rinciannya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami penambahan sebesar Rp.800.705.500,- dari Rp.563.444.000,- menjadi Rp.1.364.149.500,-.
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mengalami penambahan sebesar Rp.21.097.000,- dari Rp.2.285.929.500,- menjadi Rp.2.307.026.500,-.

b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mengalami penambahan sebesar Rp.3.760.000,- dari Rp.40.880.000,- menjadi Rp. 44.640.000,-.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mengalami penambahan sebesar Rp.19.290.000,- dari Rp. 224.440.000,- menjadi Rp.243.730.000,-.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah mengalami penambahan sebesar Rp.14.498.600,00,- dari Rp.9.390.000,- menjadi Rp.23.888.600,-.
- 2) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan mengalami penambahan sebesar Rp.1.200.000,- dari Rp.36.809.000,- menjadi Rp.38.009.000,-.

Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan yang mengalami pengurangan terdiri dari 23 Sub Kegiatan, rinciannya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mengalami pengurangan sebesar Rp.22.589.000,- dari Rp.29.083.000,00,- menjadi Rp.6.494.000,-.

- 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mengalami pengurangan sebesar Rp.5.925.000,- dari Rp.30.927.000,- menjadi Rp.25.002.000,-.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami pengurangan sebesar Rp.4.136.277.077,- dari Rp.36.628.543.250,- menjadi Rp.32.492.266.173,-.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN mengalami pengurangan sebesar Rp.4.200.000,- dari Rp.48.840.000,- menjadi Rp.44.640.000,-.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya mengalami pengurangan sebesar Rp.68.589.000,- dari Rp. 153.918.000,- menjadi Rp. 85.329.000,-
 - 2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi mengalami pengurangan sebesar Rp.189.167.000,- dari Rp.2.782.318.000,- menjadi Rp.2.593.151.000,-.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor mengalami pengurangan sebesar Rp.42.217.600,- dari Rp.58.488.500,- menjadi Rp.16.270.900,-.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mengalami pengurangan sebesar Rp.1.739.200,- dari Rp.355.423.400,- menjadi Rp.353.684.200,-.
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mengalami pengurangan sebesar Rp.11.500.000,- dari Rp.78.431.900,- menjadi Rp.66.931.900,-.
 - 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami pengurangan sebesar Rp.643.311.000,- dari Rp.1.116.552.000,- menjadi Rp.473.241.000,-.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel mengalami pengurangan sebesar Rp.657.900.900 dari Rp.758.193.100,- menjadi Rp.100.292.200,-.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami pengurangan sebesar Rp.21.960.000,- dari Rp.61.530.000,- menjadi Rp.39.570.000,-.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
 - 1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah mengalami pengurangan sebesar Rp.280.239.000,- dari Rp.404.405.800,- menjadi Rp.124.166.800,-.
 - 2) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja mengalami pengurangan sebesar Rp.113.377.000,- dari Rp.199.552.000,- menjadi Rp.86.175.000,-.

- 3) Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal mengalami pengurangan sebesar Rp.65.377.000,- dari Rp.125.247.000,- menjadi Rp.59.870.000,-.
- 4) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP mengalami pengurangan sebesar Rp.128.400,- dari Rp.32.876.000,- menjadi Rp.32.747.600,-.
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
 - 1) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah mengalami pengurangan sebesar Rp.2.790.000,- dari Rp.52.638.000,- menjadi Rp.49.848.000,-.
 - 2) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu mengalami pengurangan sebesar Rp.7.240.000,- dari Rp.124.658.400,- menjadi Rp.117.418.400,-.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan.
 - 1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan mengalami pengurangan sebesar Rp.16.668.600,- dari Rp.16.668.600,- menjadi Rp.0,-.
 - 2) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan mengalami pengurangan sebesar Rp.15.414.000,- dari Rp.15.414.000,- menjadi Rp.0,-
- b. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan.
 - 1) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah mengalami pengurangan sebesar Rp.49.340.000,- dari Rp.887.445.000,- menjadi Rp.838.105.000,-.
 - 2) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi mengalami pengurangan sebesar Rp.541.689.100,- dari Rp.1.204.381.100,- menjadi Rp.662.692.000,-.
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi mengalami pengurangan sebesar Rp.394.845.000,- dari Rp.551.099.000,- menjadi Rp.156.254.000,-.
 - 4) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas mengalami pengurangan sebesar Rp.37.933.200,- dari Rp.186.788.300,- menjadi Rp.148.855.100,-.

Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan yang tidak mengalami penambahan atau pengurangan terdiri dari 3 Sub Kegiatan, rinciannya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tidak mengalami perubahan.

- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak mengalami penambahan/pengurangan.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak mengalami penambahan/pengurangan.

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		INSPEKTORAT DAERAH								49.169.554.650	45.186.771.107	42.699.808.673	(6.469.745.977)						46.359.44 1.030	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							49.169.554.650	45.186.771.107	42.699.808.673	(6.469.745.977)							46.359.44 1.030	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							49.169.554.650	45.186.771.107	42.699.808.673	(6.469.745.977)							46.359.44 1.030	
1	37.043	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD				74,83 Nilai	74,83 Nilai	45.322.302.450	41.664.168.107	40.361.779.173	(4.960.523.277)							42.431.79 1.030	
			Indeks Pelayanan Keseekretariatan PD				91,80 Nilai	91,80 Nilai												
	6.01.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu				100%	100%	60.010.000	61.060.000	31.496.000	(28.514.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		55.000.00 0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	29.083.000	29.083.000	6.494.000	(22.589.000)	Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			33.000.00 0	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATI F (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2. 01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	30.927.000	31.977.000	25.002.000	(5.925.000)	Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat		22.000.00 0	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan				100%	100%	36.677.383.250	33.387.272.707	32.536.906.173	(4.140.477.077)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam	36.801.28 2.000	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	36.628.543.250	33.342.632.707	32.492.266.173	(4.136.277.077)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			36.750.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	48.840.000	44.640.000	44.640.000	(4.200.000)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			51.282.000	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya				100%	100%	2.936.236.000	2.796.434.000	2.678.480.000	(257.756.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		2.689.050.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	153.918.000	0	85.329.000	(68.589.000)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			64.050.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATI F (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				90 Orang	90 Orang	2.782.318.000	2.796.434.000	2.593.151.000	(189.167.000)	Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			2.625.000. 000	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran				100%	100%	1.643.895.800	1.141.454.000	945.128.000	(698.767.800)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		1.601.250. 000	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2. 06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATI F (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.488.500	16.270.900	16.270.900	(42.217.600)	Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			21.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	355.423.400	353.684.200	353.684.200	(1.739.200)	Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			315.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATI F (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	78.431.900	78.431.900	66.931.900	(11.500.000)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			89.250.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			21.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATI F (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.116.552.000	658.067.000	473.241.000	(643.311.000)	Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat		1.155.000. 000	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan				100%	100%	3.607.566.600	3.857.686.600	3.771.468.200	163.901.600			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam	866.194.3 50	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2. 07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATI F (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	2 Unit	758.193.100	758.193.100	100.292.200	(657.900.900)	Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat		460.133.100	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2. 07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				45 Unit	87 Unit	563.444.000	986.027.000	1.364.149.500	800.705.500	Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	- -		406.061.250	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2. 07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	2.285.929.500	2.113.466.500	2.307.026.500	21.097.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan				100%	100%	70.360.800	70.360.800	70.360.800	0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		65.164.680	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATI F (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	38.349.600	38.349.600	38.349.600	0	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			27.364.68 0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2. 08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32.011.200	32.011.200	32.011.200	0	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			37.800.00 0	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik				100%	100%	326.850.000	349.900.000	327.940.000	1.090.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		353.850.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2. 09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.880.000	44.640.000	44.640.000	3.760.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			44.100.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2. 09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATI F (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	7 Unit	224.440.000	243.730.000	243.730.000	19.290.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			236.250.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				93 Unit	57 Unit	61.530.000	61.530.000	39.570.000	(21.960.000)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			73.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
2	37.408	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP N-1				100 %	100%	985.456.200	1.024.166.000	532.123.400	(453.332.800)							1.559.900.000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATI F (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.2. 01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal				100%	100%	808.159.800	842.519.600	364.857.000	(443.302.800)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		1.470.000. 000	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2. 01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				15 Laporan	6 Laporan	404.405.800	409.957.000	124.166.800	(280.239.000)	Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			262.500.0 00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2. 01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATI F (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	9.390.000	34.688.600	23.888.600	14.498.600	Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			262.500.0 00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2. 01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				20 Laporan	10 Laporan	199.432.000	199.552.000	86.175.000	(113.257.000)	Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			105.000.0 00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2. 01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATI F (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	36.809.000	38.009.000	38.009.000	1.200.000	Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat		63.000.00 0	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2. 01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepaka tan	1 Kesepaka tan	125.247.000	126.237.000	59.870.000	(65.377.000)	Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat		735.000.0 00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2. 01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	2 Dokumen	32.876.000	34.076.000	32.747.600	(128.400)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			42.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi pada pengawasan tujuan tertentu N-1				100%	100%	177.296.400	181.646.400	167.266.400	(10.030.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		89.900.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATI F (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	52.638.000	53.988.000	49.848.000	(2.790.000)	Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	- -			50.000.00 0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2. 02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				4 Laporan	1 Laporan	124.658.400	127.658.400	117.418.400	(7.240.000)	Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	- -			39.900.00 0	INSPEKTORAT DAERAH
3	37.773	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pemenuhan komponen dan area Indeks Manajemen Risiko Persentase pemenuhan pilar IEKP				100 %	100%	2.861.796.000	2.498.437.000	1.805.906.100	(1.055.889.900)							2.367.750. 000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATI F (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.03.2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan				100%	100%	32.082.600	33.282.600	0	(32.082.600)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		57.750.00 0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2. 01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomen dasi	0 Rekomen dasi	16.668.600	17.268.600	0	(16.668.600)	Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			31.500.00 0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2. 01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATI F (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomen dasi	0 Rekomen dasi	15.414.000	16.014.000	0	(15.414.000)	Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat		26.250.00 0	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2. 02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi				100%	100%	2.829.713.400	2.465.154.400	1.805.906.100	(1.023.807.300)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam	2.310.000. 000	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2. 02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATI F (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	887.445.000	888.012.000	838.105.000	(49.340.000)	Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			525.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2. 02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	1.204.381.100	776.801.100	662.692.000	(541.689.100)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			262.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2. 02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATI F (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	551.099.000	611.339.000	156.254.000	(394.845.000)	Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			1.155.000. 000	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2. 02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				17 perangkat daerah	17 perangkat daerah	186.788.300	189.002.300	148.855.100	(37.933.200)	Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			367.500.0 00	INSPEKTORAT DAERAH
	J U M L A H								49.169.554.650	45.186.771.107	42.699.808.673	(6.469.745.977)							46.359.44 1.030	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam 2025-2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait pengawasan dan pembinaan perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kota Batam, Inspektorat Daerah Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2026;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD